

Kerja sama antara:



Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau



Dengan dukungan dari:

Walmart  org



Foto oleh Lucy McHugh/CIFOR

Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dokumen ini adalah bagian dari penelitian “Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia” yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF, FKMS, Jikalahari, dan PPIIG Universitas Palangka Raya; dengan dukungan dari Walmart Foundation.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara produsen dan konsumen minyak kelapa sawit terbesar dengan tren produksi dan konsumsi sawit yang cenderung meningkat. Produksi nasional minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) pada 2023 diestimasi mencapai 48 juta ton dari luasan 15 juta ha perkebunan dengan 34% kontribusi dari perkebunan rakyat. Sebanyak 16 juta orang diperkirakan terlibat di dalam sektor sawit di Indonesia sebagai pekerja langsung maupun tidak langsung. Pada 2022, tercatat 25 juta ton minyak sawit diekspor dari Indonesia ke seluruh dunia dengan total nilai perdagangan US\$27 miliar.

India, Cina, dan Pakistan merupakan beberapa negara importir terbesar minyak sawit dari Indonesia. Dari segi konsumsi domestik, adanya kebijakan biodiesel menjadi salah satu pemicu tren peningkatan konsumsi.

Untuk mewujudkan sektor kelapa sawit berkelanjutan, pemerintah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) untuk tahun 2019-2023 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019. Pada tahun 2023 terdapat delapan provinsi dan 15 kabupaten yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Sementara itu terdapat tiga provinsi dan 17 kabupaten sedang

dalam proses penyusunan peraturan daerah untuk dokumen RAD KSB. Meskipun masih banyak kendala, implementasi RAN KSB telah menghasilkan beberapa capaian, di antaranya penerbitan dokumen legalitas bagi pekebun kecil serta penerbitan kebijakan wajib sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Peran Gender dalam Sektor Perkebunan

Kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan responsif gender sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia. Faktanya, keterlibatan perempuan telah mendominasi pekerjaan di perkebunan sawit. Sebanyak 86% angkatan kerja dalam siklus produksi kelapa sawit adalah perempuan, terutama pada sektor hulu pasok rantai kelapa sawit. Sebanyak 24 dari total 28 jenis pekerjaan di kebun kelapa sawit dikerjakan oleh perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan juga mendapatkan hak mereka, terutama akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, pemerintah memberikan mandat pelaksanaan RAN KSB yang inklusif dan responsif gender. Kesetaraan gender RAN KSB terlihat pada Komponen D terkait Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa dengan persentase pelaksanaan kesetaraan gender mencapai 2,59%.

Dukungan pemerintah lainnya juga tertuang dalam sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender, yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020, yakni prinsip nondiskriminasi yang dimasukkan dalam kriteria sertifikasi dan menjadi alat verifikasi dalam bentuk ketiadaan diskriminasi berbasis jenis kelamin. Kesetaraan gender menuju perubahan transformatif dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi percepatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Perubahan yang diharapkan tidak hanya pada tingkat individu (agensi), tetapi juga perubahan pada tingkat relasional (hubungan), dan struktur sosial (norma) terhadap indikator-indikator gender yang ada.





Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (TTM)

Teori perubahan (*theory of change/ToC*), teori tindakan (*theory of action/ToA*), serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation framework/MEF*) yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA, dan MEF); adalah suatu alat untuk menjangkau visi bersama secara partisipatif. CIFOR-ICRAF dan para mitra menggunakan kerangka ini untuk memfasilitasi diskusi multipihak guna mengembangkan visi bersama dan memperkuat inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional dan subnasional.

Para pihak di tingkat nasional memiliki **visi bersama** untuk mewujudkan **pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan**

keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030. Berdasarkan model sistem dinamika SIPOS (*Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability*), tim peneliti merekomendasikan indikator pencapaian progresif berupa **penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema-skema insentif.** Visi dan indikator pencapaian ini akan diwujudkan melalui implementasi tiga jalur perubahan (*change pathways*), yakni: legalitas usaha, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jalur-jalur perubahan yang telah dikembangkan tersebut berpotensi mendorong transformasi gender.

Pemodelan Dampak Kebijakan Melalui SIPOS (*Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability*)¹

SIPOS merupakan alat untuk memodelkan skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dengan tiga komponen utama, yakni: rantai suplai kelapa sawit, intervensi atau skenario kebijakan, dan indikator-indikator untuk mengevaluasi keluaran. SIPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAN KSB. Model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Hasil simulasi SIPOS menunjukkan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dapat menurunkan deforestasi kumulatif hingga 100% dari BAU (*business as usual*), menurunkan emisi 23-25% dari BAU, dan meningkatkan pendapatan petani sebesar 9,8% dari BAU. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menurunkan volume produksi CPKO (*crude palm kernel oil*) dan nilai perdagangan khususnya pada skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan tanpa intensifikasi, sertifikasi, dan insentif.

Keseimbangan antara faktor lingkungan dan ekonomi dapat tercapai apabila terjadi penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30% dan peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25% dengan diimbangi

intensifikasi di perusahaan dan skema insentif.

Apabila skenario kebijakan ini diimplementasikan, nilai ekspor sawit akan meraup US\$7,4 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU. Skenario kebijakan yang tepat ini juga mampu mendorong peningkatan pendapatan petani 20% lebih tinggi dari BAU pada tahun 2029.

Rekomendasi Kunci

Para pihak mempunyai visi bersama untuk mewujudkan **pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030**. Berdasarkan model sistem dinamika SIPOS, tim peneliti merekomendasikan indikator pencapaian progresif yakni **penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema insentif**. Visi dan indikator di atas akan dicapai melalui kegiatan yang direkomendasikan dalam matriks rekomendasi kunci RAN KSB yang memuat lima komponen, yakni: penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas petani dan percepatan peremajaan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola dan penanganan sengketa; serta pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit.